



Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
PEMERINTAH KOTA BATAM

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rencana Kerja RENJA TAHUN 2024



Disusun oleh :
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota
Batam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Rencana Kerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rencana Kerja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Batam, 25 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA BATAM**



HENDRI ARULAN, S.Pd

NIP. 196707191991031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM. TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	II-30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM	III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	III-3
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	III-4
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM	IV-1
 BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Catatan Penting	V-1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V-3
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	II-10
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	II-17
Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam	II-31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam	III-10
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023	IV-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja PD disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) ;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
12. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap rancangan Awal RKPD;
5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 10.792.074.444.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA BATAM

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2021 (Diambil dari SIPP tahun 2021)	Target renja Perangkat Daerah tahun n-2 (Diambil dari SIPP tahun 2022)	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun n-2 (Diambil dari SIPP tahun 2022)	Tingkat realisasi (%)	2023	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (Diambil dari Triwulan kedua)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					2022	2022			2023	
1	2	3	4	5	6	7	(8)= {(7) : (6)}*100 %	9	(10)= (5) + (7)	(11) = {(10): (4)}*10 0%

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100 %	46.97%	22.23%
2	17	1	02.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100 %	46.97%	22.23%
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	94.87%	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100%
2	17	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	20%
2	17	1	02.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrai Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	80,19%	80%	100 %	30.60%	20%
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	20%
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	20%
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	15%

2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	20%
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	3 laporan	5%
2	17	1	02.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	19.68%	20%
2	17	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1 paket	0 Paket	0	0	0	0	0
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	240 Unit	48 paket	48 paket	48 paket	100%	48 paket	10 paket	4.17%
2	17	1	02.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	34.45%	34.5%
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	6 laporan	10%
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	6 laporan	10%
2	17	1	02.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	12,08%	12%	100%	48.44%	48%

					Pemerintahan Daerah	Daerah yang layak fungsi									
2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	100%	
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 unit	75%	
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	280 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	30 Unit	11%	
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0	2 Unit	0	0	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	32.02 %	32.02 %	26.94%	26.95%	10%	32.02%	21.20%	78%	
2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	7,39 %	0	2.16%	5.48%	25.37%	2.98%	41.20%	0	

					Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	320 Unit	-	50 orang	50 Orang	50 orang	60 orang	60 orang	19%
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %	0	0	0	0	91.67 %	7.91%	9%
2	17	4	02.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	62,50%	0-	0	0	0	41.67%	7.91%	13%
2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit	0	0	0	0	25 Orang	12 orang	48%
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	30.91 %	21.31%	24.45%	14.41%	59%	30.79%	39.90%	51%
2	17	5	02.01		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Persentase Koperasi yang dilatih	53.85 %	100%	52.40%	34.60%	66.03%	380 orang	30.90%	75%

					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi (Pengurus) yang dilatih	172 Orang	263 orang	160 orang	91 orang	56.88%	180 orang	56 orang	6%
2	17	5	02.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih	26,90%	100%	19.76%	7.54%	38.16%	16.76%	47.93%	17%
2	17	5	02.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang SDMnya dilatih	500 orang	72 orang	180 Orang	70 orang	38.89%	180 orang	52 orang	10.40%
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	34%	0	21%	21%	95.64%	0	0	0
2	17	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UMKM koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya	53.51%	0	42%	78.04	95.64%	0	0	0
2	17	6	02.01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan	245 Orang	0	105orang	200 orang	200 Orang	0	0	0

				Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	kompetensi SDM UKM dan kewirausahaan								
2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	39.21% %	30 %	29.98%	27.37%	0	34.45%	80.18%	206%
2	17	7	02.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	2.237 Unit	150 unit usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	94.34%	250 Unit Usaha	200 Unit Usaha	27%
2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit Usaha	150	0	0	0	0	0

2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	1250 Unit	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	250 Unit Usaha	94.34 %	250 Unit Usaha	200 Unit Usaha	275 Unit Usaha
2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina dan bernilai tambah	97 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	100 %	42.15%	27.37%	64.93%	53.79%	45.39%	84%
2	17	8	02.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	1.000 Unit	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254 Unit Usaha	70.56%	470 Unit Usaha	254 Unt Usaha	25%
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	750 Unit	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254 Unit Usaha	70.56%	470 Unit Usaha	254 Unt Usaha	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

1	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Th 2021 (th-2)	Th 2022 (th-1)	Th 2023 (th-2)	Th 2024 (th+1)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase koperasi yang aktif	-	√	0,00%	26.94%	27.70%	28.81%	30.23%	32.02%	2,55%	3,73%	56%	80%	
2	Persentase koperasi yang sehat	-	√	0,00%	0,00%	80%	83.33%	88.89%	91.67%	40%	55%	100%	100%	
3	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	-	√	18.59%	21.38%	23.77%	25.36%	27.26%	30.79%	35%	60%	100%	100%	
4	Persentase peningkatan kinerja (nilai omzet) koperasi	-	√	0.00%	21%	0.00%	0.00%	24%	0.00%	20%	21%	100%	100%	
5	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	-	√	27.03%	30%	34.45%	35.34%	37.45%	39.21%	26.94%	43.34%	100%	100%	
6	Persentase usaha mikro ekonomi kreatif	-	√	26.32%	42.15%	43.76%	45.45%	48.60%	53.79%	23.24%	24.85%	100%	100%	

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Kurang Adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima cukup tinggi.

2. Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan tergantung kualitas produk (a.1 : Ketersediaan bahan baku, pengolahan, kemasan dan legalitas), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

3. Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di

mainland sangat mudah dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di sisi lain pelaku ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesibilitas kepada sumber daya ekonomi.

5. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan ahli teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain: Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good government, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro melalui PLUT KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro meningkat.
- e. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, usaha Mikro melalui BLUD serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank.
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
Bidang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

❖ Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM.
- b. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan

UKM Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

- c. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi
- e. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi, peluang pasar.
- f. Kualitas produk belum berdaya saing.
- g. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat Rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM.
- h. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM.

❖ **Peluang dan Tantangan**

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Batam tengah di hadapkan dengan berbagai macam tantangan antara lain;

- a. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
- b. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;
- c. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
- d. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD;
- f. Belum Validnya data UMKM;
- g. Adanya Perubahan Regulasi.

Namun dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Batam ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian;
 - Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kota Batam;
 - Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya;
 - Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUMKM semakin mudah untuk mendapatkan permodalan;
 - Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja;
 - Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media Informasi;
 - Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya tarik;
 - Peraturan perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM, Permen tentang KUMKM, PP tentang KUMKM, Perda tentang KUMKM) memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha KUMKM;
 - Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR;
 - Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM
- Meningkatnya arus investasi asing ke Kota Batam;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2024. Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2024 menjadi Rencana Kerja tahun 2024, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan

tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja tahun 2024. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL DATA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN SEMUA SUB ORGANISASI				14.494.959.093					17.362.287.818,00	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.689.968.478	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.411.841.250,00	
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	8.919.595.988	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	8.594.702.234	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	41 orang	8.840.577.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS DISKUM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	43	8.560.497.234	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	79.018.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	34.205.000	
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	260.958.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	278.509.500	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah target Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3.355.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	7.160.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	53.411.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	54.710.500	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	38.183.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	12.615.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan barang cetakan dan pengganddan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	26.592.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	19.623.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	139.415.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	182.601.000	
III	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	192.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	318.304.000	
1	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	48 Unit	192.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	318.304.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			diadakan					yang diadakan			
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Paket	0	
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	699.448.640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	787.859.516	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	322.460.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	295.356.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								disediakan			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang	12 Laporan	376.988.640	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492.502.716	
V	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	617.565.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	1.432.466.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	38.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Unit	140.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	162.086.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	43.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 Unit	48.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor yang Pelihara/Rehabilitasi	2 unit	395.865.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-1.182.400.000	
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi Aktif	32,02%	146.837.345	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi Aktif	28.81%	238.286.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	2,96%	146.837.345	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	6.74%	238.286.000	
1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	146.837.345	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Unit	238.286.000	
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	92%	125.266.176,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	83.33%	83.044.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	41,67%	125.266.176,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	43.48%	83.044.000	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	50 Unit Usaha	125.266.176,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30 unit	83.044.000	
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	26,49%	528.783.454	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	25.36%	483.129.200	
I	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Batam	Persentase koperasi yang dilatih	26.49%	528.783.454	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	59.35%	483.129.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Daerah Kabupaten/Kota					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	435 Orang	528.783.454	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Batam	Jumlah SDM yang memenuhi pengetahuan perkoperasian	165 Orang	528.783.454	
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase usaha mikro yang dibangun dan aktif	39%	1.061.042.741	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase usaha mikro yang dibangun dan aktif	35.34%	4.010.326.000	
I	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Batam	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	39%	1.061.042.741	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	482 usaha mikro	4.010.326.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Para Pemangku Kepentingan					Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
1	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata Kabupaten/Kota	2400 Unit Usaha	1.076.756.000	
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	160 Unit Usaha	193,010,200	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	56 unit usaha	212.592.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	266,724,721	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 unit usaha	1.759.720.000	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Batam	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 orang	25.690.000	
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	62.208.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	62.208.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	873.360.000		Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	873.360.000	
F	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	1,943,060,899	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	45.45%	1.135.661.368	
I	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	540 Unit Usaha	1,943,060,899	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	620 Unit usaha	1.135.661.368	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RENCANA KERJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	540 Unit Usaha	1,943,060,899	Pengembangan Usaha Mikro	Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	470 Unit usaha	1.135.661.368	
2.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Batam	Jumlah yang Difasilitasi			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Batam	Jumlah yang Difasilitasi	299 Orang	0	

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem SIPD yang diajukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA BATAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)		Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif		
a	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Tanjung Buntung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Work shop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemuladi 144 Orang	Usulan Masyarakat
2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Teluk Tering Jodoh	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Work shop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 250 Orang	Usulan Masyarakat
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Pulau Abang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan Manajemen Usaha Kelompok 100 Orang	Usulan Masyarakat
4	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kelurahan Lubuk Baja Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Work shop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 330 Orang	Usulan Masyarakat
5	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Sekanak Raya	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 50 Orang	Usulan Masyarakat

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Batam Kota	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 100 Orang	Usulan Masyarakat
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Sekanak Kecamatan Sagulung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 117 Orang	Usulan Masyarakat
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Bengkong	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 566 Orang	Usulan Masyarakat
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Bengkong Laut	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro (Yang belum Memiliki legalitas usaha)/Wirausaha Pemula 100 Orang	Usulan Masyarakat
10.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar	Jumlah yang Difasilitasi 140 orang	Pelatihan pengembangan Usaha Mikro	Usulan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih professional.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Batam Tahun 2024

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target 2024
1	2	3	4	5
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro			28,21%
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terhadap Layanan Kesekretariatan	100%
		Meningkatnya produktifitas Koperasi di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Koperasi	23,00%
		Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro	58,59%
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah			80,07%
		Meningkatkan Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	27,00%

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2024

dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, melalui sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2024 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah :

“Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan Perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif”

Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan
2. Peningkatan produktifitas usaha dan kelembagaan koperasi
3. Meningkatkan pengawasan koperasi sector rill dan usaha simpan pinjam
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan daya saing Koperasi
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui pengembangan SDM, produksi, pengolahan, pemasaran, desain dan teknologi
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public
7. Meningkatkan SDM Perangkat Daerah yang diberi pendidikan dan pelatihan lanjutan

8. Meningkatkan penggunaan system informasi dalam proses pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Koperasi Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas koperasi dan usaha mikro di Kota Batam
2. Meningkatnya peran usaha mikro ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Batam
3. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2024 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan,

kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik

yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- c) Penyediaan bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan. Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan. Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub sub kegiatan:
 - a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- d) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- e) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
- f) Fasilitasi Kemudahan Perzinan

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Usaha Mikro
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

Tabel 3.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2024,
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA BATAM**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA) <i>(diambil dari SIPD RI)</i>				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 <i>(diambil dari RENSTRA PD)</i>	
				LOKASI	TARGET 2024	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				17.362.287.818,00				15,818,949,303
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.362.287.818,00				15,818,949,303
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.362.287.818,00				15,818,949,303

1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		100 %	11.411.841.250,00			100 %	11,873,912,731
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>		100 %	8.594.702.234,00		-	100 %	9,412,555,851
	2.17.01.2.02. 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	43 Orang/bulan	8.560.497.234,00	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,	-	43 Orang/bulan	9,330,622,087

							PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM			
	2.17.01.2.02. 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Dokumen	34.205.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	81,933,764
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>		100 %	278.509.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 %	400,587,403
	2.17.01.2.06. 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai	2 Paket	7.160.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Paket	3,479,577

			<i>yang Disediakan</i>	Harapan						
2.17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	4 Paket	54.710.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Paket	55,382,177
2.17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	4 Paket	12.615.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Paket	39,592,471
2.17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	2 Paket	19.623.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Paket	27,573,763

2.17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Dokumen	1.800.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	2.500.000,00
2.17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Laporan	182.601.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	274,559,414
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>		100 %	318.304.000,00		-	100 %	587,967,808
2.17.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai	17 Unit	318.304.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH	-	17 Unit	249,488,976

			<i>Disediakan</i>	Harapan			(PAD)			
2.17.01.2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>			100 %	787.859.516,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 %	725,258,295
2.17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		12 Laporan	295.356.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	334,358,774
2.17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan		12 Laporan	492.502.716,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	390,899,521
2.17.01.2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>			100 %	1.432.466.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 %	690,343,374

		Daerah								
2.17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Unit	39.780.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	39,692,532
2.17.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	3 Unit	162.086.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Unit	145,580,760
2.17.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	56 Unit	48.200.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	56 Unit	44,607,438

	2.17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.182.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Unit	460,462,644
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang aktif</i>		28.81 %	238.286.000,00			28.81 %	152,123,490
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>		6,74 %	238.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif	6,74 %	152,123,489.72
	2.17.03.2.01.002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Unit Usaha	238.286.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif	65 Unit Usaha	152,123,490
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>		83.33 %	83.044.000,00			83.33 %	129,888,497.89
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya</i>		43,48 %	83.044.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	43,48 %	129,888,497.89
	2.17.04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	30 Unit Usaha	83.044.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	30 Unit Usaha	129,888,497.89

				Kel/Desa						
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>		26,49 %	483.129.200,00			26,49 %	548,069,520
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>		59,35 %	483.129.200,00		Koperasi aktif	59,35 %	287,868,646
	2.17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> Jumlah SDM Koperasi (pengurus) yang dilatih	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435 Orang	483.129.200,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Koperasi aktif	435 Orang	287,868,646
	2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah	<i>Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih</i>		19,79 %	0,00		-	19,79 %	260,200,875

		Kabupaten/Kota								
	2.17.05.2.03.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro								
			0	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	00	260,200,875
5,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</i>		35.34 %	4.010.326.000,00			35.34 %	1,100,195,218
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>		482 Usaha Mikro	4.010.326.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	482 Usaha Mikro	1,100,195,218

		dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2.17.07.2.01.001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
		<i>Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.076.756.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	1 Dokumen	135.326.862,00	
2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
		<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Unit Usaha	212.592.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	56 Unit Usaha	212.311.220,00	
2.17.07.2.01.003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	100 Unit Usaha	62.208.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	100 Unit Usaha	226.328.520,00	

				Kel/Desa						
2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit Usaha	1.759.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	200 Unit Usaha	293.397.193,00
2.17.07.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	25.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	25 Orang	82.500.000,00
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan									
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	100 Orang	873.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Usaha Mikro	100 Orang	

				Kel/Desa						
6,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>		45.45 %	1.135.661.368,00			45.45 %	2,014,759,846
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif</i>		620 Usaha Mikro	1.135.661.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit usaha	620 Usaha Mikro	2,014,759,846
	2.17.08.2.01.002	Pengembangan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470 Unit Usaha	1.135.661.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit usaha	620 Unit Usaha	2,014,759,846
	2.17.08.2.01.003	Penumbuhan dan Pengembangan								

		Kewirausahaan								
			<i>Jumlah orang yang Difasilitasi</i>	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Orang	200 Orang	200.000.000
	JUMLAH					17.362.287.818,00				15,818,949,303

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rencana Kerja tahun 2024 dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan:

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

D. Program Pemberdayaan Usaha Mengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan:

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

E. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan:

- Pengembangan Usaha Mikro
- Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

F. Program Penunjang Urusan Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatalaksanaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

b) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
- Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								17.362.287.818,00							15.195.448.951,00		
	2							17.362.287.818,00							15.195.448.951,00		
	2	17						17.362.287.818,00							15.195.448.951,00		
1	2	1071						11.411.841.250,00							100% 100% 100%	11.761.285.325,00	

	2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	8.594.702.234,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-	-	9.811.555.586,00	
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang /bulan	8.560.497.234,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJAN	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		9.724.635.786,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

												JIAN KERJA, DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM , PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)							
	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
		7	1	0	03														
						Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD				12 Doku men	34.205.00 0,00	- Kota Batam , Sekup ang, Sunga i Harap an	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Optimal isasi Potensi Pereko nomian Daerah 01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi.	-		86.919.80 0,00	DINAS KOPER ASI DAN USAH A MIKR O

	2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	278.509.500,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-	-	289.553.855,00	
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7.160.000,00	- Kota Batam , Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		3.691.325,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

		7	1	0	02															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	54.710.500,00	- Kota Batam , Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		58.752.430,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		7	1	0	06															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.615.000,00	- Kota Batam , Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		42.001.850,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		7	1	0	06															

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.623.000,00	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		29.251.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		7	1	0	06															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	-		2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

		7	1	0	09														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	182.601.000,00	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.356.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-		100 %	318.304.000,00			-	-	-	-	211.460.000,00	
	2	1	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		7	1	0	06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			17 Unit	318.304.000,00	- Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		211.460.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	-		100 %	787.859.516,00			-	-	-	-	769.393.504,00	
		7	1	0	08														

		7	1	0	09														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi			2 Unit	1.182.400.000,00	- Kota Batam , Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimal isasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaan Pembangunan Ekonomi.	-		435.452.380,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	2	1	0			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	32.02%		28.81%	238.286.000,00			Mempertahankan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.		32.02%	161.521.079,00		

	2	1	0	2.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	-			6,74 %	238.286.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	-	161.521.079,00	
	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
					04		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				65 Unit Usaha	238.286.000,00	- Kota Batam , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekono	Koperasi Aktif		161.521.079,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

	2	1	0	2.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-			59,35 %	483.129.200,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi aktif	-	581.661.798,00	
	2	1	0	2.	00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				165 Orang	483.129.200,00	- Kota Batam , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSU S-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi aktif		581.661.798,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

5	2	1	0			PROGRA M PEMBERD AYAAN USAHA MENENG AH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	39. 21%			35.34 %	4.010.326 .000,00			Memp erkuat ketaha nan ekono mi untuk pertum buhan berkual itas dan berkea dilan.			39. 21 %	1.167.147 .015,00	
	2	1	0	2. 0 1		Pemberda yaan Usaha Mikro yang difasilitasi yang Dilakukan Melalui Pendataa n, Kemitraan , Kemudah an Perizinan, Penguata n Kelembag aan dan Koordinas i dengan Para Pemangk u Kepenting an	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi,sosi alisasi, Pelatihan dan Kemitraan	-			482 Usaha Mikro	4.010.326 .000,00			-	Optimal isasi Potensi Pereko nomian Daerah 01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi.	Usah a Mikr o	-	1.167.147 .015,00	
	2	1	0	2.	00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

		7	7	0 1	02															
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				56 Unit Usaha	212.592.000,00	- Kota Batam , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekonomi.	Usaha Mikro		212.311.200,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	1 7	0 7	2. 0 1	00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	62.208.000,00	- Kota Batam , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemertaaan Pembangunan Ekono	Usaha Mikro		226.328.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

											Semua Kel/D esa			atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi.				
6	2	1	0		PROGRA M PENGEMB ANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53. 79%		45.45 %	1.135.661 .368,00			Memp erkuat ketaha nan ekono mi untuk pertum buhan berkual itas dan berkea dilan.		53. 79 % 53. 79 %	1.386.040 .941,00		
	2	1	0	2. 0 1	Pengemb angan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkat an Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	-		620 Usaha Mikro	1.135.661 .368,00			-	Optimal isasi Potensi Pereko nomian Daerah 01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan	Unit usah a	-	1.386.040 .941,00	

												a Kel/D esa	KHUSU S- DANA ALOKA SI KHUSU S NON FISIK		Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi.						
JUMLAH											17.362.28							15.195.44			
											7.818,00							8.951,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya

Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

- a. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam da Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b.Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan

- dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
 - e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batam, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670719 199103 1 009



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pramuka No. 01 Sekupang, Telp (0778) 321670 FAX.(0778) 327137

<http://diskum.batamgo.id> e-mail : ukmbatam@gmail.com

BATAM

Kode Pos 29422

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 071.a /DISKUM-BTM/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada point a perlu menunjuk Tim Penyusun Renja yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 1999 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

- o. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);
- q. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Tim Penyusun Renja Kota Batam dan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024;
- Kedua : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 8 Desember 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM**



Drs. SULEMAN NABABAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19630112 199103 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 071.a /**DISKUM-BTM/XII/2022**
TANGGAL : 8 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM TAHUN 2024**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Sekertaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan Program	Sekretaris
4	Kabid perizinan USP/KSP Pengawasan dan Pemeriksaan	Anggota
5	Kabid Penilaian Kesehatan USP/KSP	Anggota
6	Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Anggota
7	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Anggota
8	Kasubbag. Keuangan	Anggota
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
10	Kasi Izin USP/KSP	
11	Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan	Anggota
12	Kasi Penilaian Kesehatan USP	Anggota
13	Kasi Penilaian Kesehatan KSP	Anggota
14	Kasi Perlindungan Koperasi	Anggota
15	Kasi Usaha Koperasi	Anggota
16	Kasi Pengembangan Usaha Mikro	Anggota
17	Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan dan Data Usaha Mikro	Anggota

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 8 Desember 2022



Drs. SULEMAN NABABAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199103 1 008